



INTERNATIONAL MONETARY FUND



Siaran Pers No. 19/305
UNTUK DITERBITKAN SEGERA
31 Juli 2019

Dana Moneter Internasional
700 19th Street, NW
Washington, D. C. 20431 USA

Dewan Eksekutif IMF Menyelesaikan Konsultasi Pasal IV 2019 dengan Indonesia

Pada tanggal 3 Juli 2019, Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyelesaikan konsultasi Pasal IV¹ dengan Indonesia.

Perekonomian Indonesia berkinerja dengan baik pada 2018, terlepas adanya hambatan eksternal, termasuk pembalikan aliran modal. Pertumbuhan stabil di atas 5 persen, di mana permintaan domestik yang kuat mengimbangi penurunan ekspor netto. Pemulihan pertumbuhan kredit mendukung aktivitas ekonomi. Inflasi menurun menjadi sekitar 3 persen, yakni di paruh bawah dari rentang target resmi ($3,5 \pm 1$ persen), karena kenaikan harga pangan terkendali, harga listrik dan beberapa bahan bakar dipertahankan tetap, dan kebijakan makroekonomi diperketat. Inflasi inti stabil pada 3 persen. Defisit neraca transaksi berjalan melebar menjadi 2,98 persen dari PDB di 2018 (1,6 persen di 2017), terutama karena ekspor komoditas yang lebih rendah dan impor terkait infrastruktur yang lebih tinggi.

Prospek ekonomi positif. Pertumbuhan PDB riil diproyeksikan tetap stabil di 5,2 persen pada 2019 dan 2020, dan naik ke tingkat potensial (5,3 persen) dalam jangka menengah, didukung permintaan domestik yang kuat. Neraca perbankan yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut akan mempertahankan pertumbuhan kredit di sekitar 12 persen. Inflasi diproyeksikan tetap berada dalam kisaran target. Defisit neraca transaksi berjalan akan terus menurun secara bertahap menjadi 2,6 persen dari PDB selama jangka menengah. Defisit fiskal diproyeksikan tetap konstan pada 1,8 persen dari PDB. Risiko untuk prospek ini condong ke sisi negatif. Risiko utama adalah eksternal yang meliputi meningkatnya ketegangan perdagangan, pengetatan tajam kondisi keuangan global, pertumbuhan yang lebih lemah dari yang diharapkan di Tiongkok, dan gejolak harga komoditas, khususnya harga minyak yang lebih tinggi yang akan berimbas pada peningkatan defisit neraca transaksi berjalan. Sebaliknya, dimulainya masa jabatan kedua

¹ Berdasarkan Artikel IV Anggaran Dasar IMF, IMF mengadakan diskusi bilateral dengan para anggota, biasanya setiap tahun. Sebuah tim staf mengunjungi negara tersebut, mengumpulkan informasi ekonomi dan keuangan, dan berdiskusi dengan para pejabat mengenai perkembangan dan kebijakan ekonomi negara tersebut. Saat kembali ke kantor pusat, staf menyiapkan laporan, yang menjadi dasar diskusi oleh Dewan Eksekutif.

Pemerintahan ini dapat mengintensifkan upaya reformasi, yang akan meningkatkan kepercayaan, investasi, dan pertumbuhan.

Penilaian Dewan Eksekutif²

Direktur Eksekutif memuji respons kebijakan pemerintah dalam menghadapi hambatan eksternal yang kuat di 2018, yang mendukung kinerja ekonomi yang positif. Sementara mencatat prospek ekonomi yang baik, Direksi mendorong pihak berwenang untuk tetap waspada terhadap risiko, termasuk risiko pembalikan arus modal, mengingat ketergantungan Indonesia pada pembiayaan eksternal. Mereka menganggap bahwa mencapai pertumbuhan potensial yang lebih tinggi memerlukan paket reformasi struktural yang komprehensif, termasuk mobilisasi pendapatan domestik yang lebih tinggi dan pendalaman keuangan, yang akan mengurangi kerentanan dan memfasilitasi reformasi komplementer dalam modal manusia, infrastruktur, dan pasar tenaga kerja dan produk.

Direksi menyambut baik fokus bauran kebijakan jangka pendek yang tepat untuk melindungi stabilitas makroekonomi dan keuangan, menjaga bantalan (*buffers*), dan mengatasi kerentanan. Direksi mendukung mempertahankan sikap fiskal yang netral dan menelaah kebijakan makroprudensial dengan saksama untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Dengan inflasi dalam rentang target, Direksi melihat adanya peluang untuk relaksasi posisi kebijakan moneter yang hati-hati, kecuali tekanan neraca modal signifikan muncul kembali. Para Direksi mendorong membiarkan nilai tukar terus bergerak sejalan dengan kekuatan pasar, dengan intervensi FX dibatasi untuk mencegah kondisi pasar yang kacau.

Direksi menyambut baik upaya berkelanjutan pemerintah untuk melindungi bantalan fiskal, termasuk dengan penghapusan defisit primer pada 2018, dan meningkatkan kualitas pengeluaran dengan menyeimbangkan kembali belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Namun, Direksi mencatat bahwa pendapatan pemerintah tetap berada di bawah negara-negara lain yang setara dan tidak cukup untuk membiayai tujuan pembangunan pemerintah. Dalam konteks ini, mereka menyoroti pentingnya menerapkan strategi pendapatan jangka menengah, yang menggabungkan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan yang terurut dan terprioritaskan dengan baik, membiayai pengeluaran prioritas dan reformasi struktural, dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Direksi juga menyerukan untuk memantau risiko dan utang-utang bersyarat (*contingent liabilities*) yang timbul dari badan usaha milik negara dan kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Direksi memuji upaya untuk meningkatkan infrastruktur, merampingkan peraturan dan mereformasi sektor pendidikan dan kesehatan, yang telah memberikan kontribusi terhadap

² Pada akhir diskusi, Direktur Pelaksana, sebagai Ketua Dewan, meringkas pandangan para Direktur Eksekutif, dan ringkasan ini disampaikan kepada otoritas negara dimaksud. Penjelasan tentang kualifikasi yang digunakan dalam pernyataan kesimpulan dapat ditemukan di sini: <http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm>.

perbaikan lingkungan ekonomi. Direksi mendorong pemerintah untuk memperluas upaya-upaya ini dan mengatasi hambatan struktural terhadap pertumbuhan lebih tinggi yang masih ada, termasuk dengan memperkuat tata pemerintahan dan lingkungan bisnis. Tindakan prioritas juga termasuk meningkatkan modal manusia, meningkatkan partisipasi kerja perempuan, mengurangi pembatasan investasi asing langsung, dan merampingkan peraturan pasar tenaga kerja dan produk.

Direksi menyambut baik kemajuan dalam penguatan kerangka pengawasan keuangan dan manajemen krisis dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan rekomendasi FSAP. Ke depannya, Direksi mendorong pemerintah untuk fokus pada bidang-bidang yang diidentifikasi oleh FSAP di mana perbaikan lebih lanjut diperlukan, termasuk mengklarifikasi mandat kelembagaan, meningkatkan pengawasan lembaga keuangan non-bank dan konglomerat keuangan, memperkuat kerangka hukum untuk pengawasan keuangan dan manajemen krisis, serta memperkuat kerangka manajemen krisis. Direksi juga mendorong penguatan kerangka aturan AML/CFT yang berkelanjutan.

Indonesia: Indikator Ekonomi Terpilih, 2014–2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
						Proyeksi	Proyeksi
PDB riil (persen perubahan)	5.0	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2
Permintaan domestik	5.0	4.2	4.6	5.0	6.3	5.4	5.2
<i>Di antaranya:</i>							
Konsumsi swasta 1/	5.3	4.8	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1
Konsumsi pemerintah	1.2	5.3	-0.1	2.1	4.8	4.5	4.5
Investasi tetap bruto	4.4	5.0	4.5	6.2	6.7	6.2	5.9
Perubahan persediaan 2/	0.5	-0.6	0.2	-0.1	0.7	0.0	0.0
Ekspor netto 2/	-0.2	0.9	0.1	0.3	-1.0	-0.1	0.0
Tabungan dan investasi (persen PDB)							
Investasi bruto 3/	34.6	34.1	33.9	33.7	34.5	34.7	34.9
Tabungan nasional bruto	31.5	32.0	32.0	32.1	31.4	31.8	32.0
Harga (persen perubahan 12-bulan)							
Harga konsumen (pada akhir periode)	8.4	3.4	3.0	3.6	3.1	3.1	3.1
Harga konsumen (rerata selama periode)	6.4	6.4	3.5	3.8	3.2	3.1	3.1
Keuangan pemerintah (persen PDB)							
Pendapatan umum pemerintah	16.5	14.9	14.3	14.1	14.9	14.8	14.9
Belanja umum pemerintah	18.6	17.5	16.8	16.6	16.6	16.7	16.7
<i>Di antaranya:</i> Subsidi energi	3.2	1.0	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0
Neraca pemerintah umum	-2.1	-2.6	-2.5	-2.5	-1.8	-1.8	-1.8
Keseimbangan primer	-0.9	-1.2	-1.0	-0.9	0.0	-0.1	-0.1
Utang umum pemerintah	24.7	27.0	28.0	29.4	30.1	30.2	29.9
Tunai dan kredit (persen perubahan 12-bulan; akhir periode)							
Rupiah M2	13.3	9.2	11.7	9.6	5.8
Uang primer	11.6	3.0	4.6	9.7	-1.5
Kredit Sektor Swasta	11.8	10.3	7.7	8.7	12.0	12.3	12.4
Suku bunga antarbank satu bulan (rerata selama periode)	7.5	7.1	6.5	5.6	6.2
Neraca pembayaran (dalam milyar dollar AS, kecuali disebut lain)							
Neraca akun berjalan	-27.5	-17.5	-17.0	-16.2	-31.1	-32.4	-34.7
Dalam persen PDB	-3.1	-2.0	-1.8	-1.6	-3.0	-2.9	-2.9
Neraca perdagangan	7.0	14.0	15.3	18.8	-0.4	-4.6	-0.6
<i>Di antaranya:</i> Minyak dan gas (netto)	-11.8	-5.7	-4.8	-7.3	-11.6	-16.2	-17.0
Investasi langsung masuk	21.8	16.6	3.9	20.6	22.0	23.7	27.0
Neraca keseluruhan	15.2	-1.1	12.1	11.6	-7.1	1.2	2.8
Dasar tukar, persen perubahan (di luar minyak)	1.4	-1.8	0.4	1.3	1.1	-0.6	-0.1
Cadangan bruto							
Dalam milyar dollar AS (di akhir periode)	111.9	105.9	116.4	130.2	120.7	121.9	124.7
Dalam bulan impor barang dan jasa prospektif	8.1	8.0	7.6	7.2	6.4	6.0	5.7
Sebagai persentase utang jangka pendek 4/	189	191	213	237	203	185	171
Total utang eksternal 5/							
Dalam milyar dollar AS	293.3	310.7	320.0	352.5	376.8	415.0	455.2
Sebagai persentase PDB	32.9	36.1	34.3	34.7	36.9	37.7	37.7
Nilai tukar							
Rupiah per dollar AS (rerata selama periode)	11,862	13,391	13,306	13,383	14,231
Rupiah per dollar AS (pada akhir periode)	12,435	13,788	13,473	13,568	14,390
Catatan lain-lain:							
Jakarta Stock Exchange (persen perubahan 12-bulan, indeks gabungan)	22.3	-12.1	15.3	20.0	-2.5
Produksi minyak (ribuan barrel per hari)	794	800	820	815	800	740	710
PDB nominal (trilyun rupiah)	10,570	11,526	12,402	13,587	14,826	16,047	17,409

Sumber: Data disediakan oleh pemerintah Indonesia; serta estimasi dan proyeksi staf IMF.

1/ Termasuk konsumsi NPISH.

2/ Kontribusi terhadap pertumbuhan PDB (poin persentase).

3/ Termasuk perubahan dalam cadangan.

4/ Utang jangka pendek atas dasar sisa utang jatuh tempo.

5/ Utang luar negeri pemerintah dan swasta.